

**FORUM PEMANGKU KEPENTINGAN LOKAL  
KOMITE PENASIHAT PEMANGKU KEPENTINGAN (SAC)  
CATATAN PERTEMUAN**

Lokasi : Mulia 3 - 4, Premiere Hotel, Pekanbaru  
Tanggal, waktu : Selasa, 9 Juli 2019  
Peserta

<b>Akademia</b>	
1. Eno Suwarno (Universitas Lancang Kuning Riau)	3. Mardhiansyah (Universitas Riau)
2. Zarkasih (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)	4. Azharuddin M. Amin (Universitas Islam Riau)
<b>Assosiasi</b>	
1. Arpi Marzuki (APINDO)	
<b>Pemerintahan</b>	
1. M. Putrappier (KPHK Kerumutan)	6. Imam Sukendar (KPH Kampar Kiri)
2. Novi Mulyadi (BBKSDA Riau)	7. Suwandi (BBKSDA Riau)
3. Yulianti (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion)	8. Setyo W. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
4. Siska Katrin S. (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion)	9. Hambali (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
5. Faizal (KPH Tasik Besar Serkap)	
<b>LSM</b>	
1. Teddy Hardiansyah (KABUT Riau)	8. Hasan (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat)
2. Nurman (AMAN Riau)	9. Melki Rumania (Yayasan Hutan Riau)
3. Destriandi (Perkumpulan Alam Sumatera)	10. Yuni Larasati (Yayasan Hutan Riau)
4. Irfan Miswari (Scale Up)	11. Harry Oktavian (Bahtera Alam)
5. Istiqomah M. (Scale Up)	12. Tarlaili (LAM Riau)
6. Dede Kunaifi (Scale Up)	13. Maizaldi (Kelompok Advokasi Riau)
7. Rendra Yusti (Lembaga Pemberdayaan Aksi dan Demokrasi)	14. Fatra Budianto (TAPAK Riau)
<b>SAC dan KPMG PRI</b>	
1. Joseph C. Lawson (Ketua)	5. Neil Byron
2. Ibu Erna Witoelar	6. Roopa Dave (KPMG PRI)
3. Bapak Al Azhar	7. Bapak Yudi Iskandarsyah (Anggota Tim KPMG)
4. Jeffrey A. Sayer	
<b>Perwakilan APRIL</b>	
1. Dian Novarina	5. B.S.Sujarwo
2. Susilo Sudarman	6. Triana Krisandini
3. Binahidra Longardi	7. Natasha Gabriella
4. Khaerul Basyar	

### **Kata Sambutan – Bapak Al Azhar (SAC)**

- Menyambut para peserta dalam Forum Pemangku Kepentingan Lokal oleh SAC.
- Menerangkan bahwa, sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya, SAC menyelenggarakan Forum Pemangku Kepentingan Lokal di Pekanbaru sebagai sarana untuk menyampaikan hasil temuan proses *assurance* serta hasil pengamatan dari dua perwakilan pemangku kepentingan yang berpartisipasi dalam proses *assurance*.
- Menjelaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari dukungan SAC terhadap komitmen APRIL terhadap transparansi APRIL.
- Menyebutkan bahwa forum serupa telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2019 dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan.
- Mempersilahkan anggota SAC dan KPMG untuk memperkenalkan diri kepada para hadirin.
- Menyampaikan harapannya agar forum hari ini dapat berjalan lancar dan produktif.

### **Proses Assurance SFMP 2.0 Tahun 2019 – Yudi Iskandarsyah, Anggota Tim Assurance KPMG**

- Menjelaskan latar belakang proses *assurance* SFMP 2.0 yaitu untuk melakukan verifikasi kinerja APRIL dalam menjalankan komitmen SFMP 2.0.
- Menyatakan bahwa KPMG PRI dipilih langsung dan bertanggung jawab kepada Komite Penasihat Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Advisory Committee/SAC*) untuk melakukan proses *assurance*.
- Menjelaskan proses *assurance* untuk tahun 2019 yang memiliki 10 indikator prioritas yang difokuskan pada sejumlah komitmen SFMP 2.0 yang dinilai penting, dengan lingkup periode data yang digunakan adalah 1 Januari – 31 Desember 2018.
- Memaparkan langkah-langkah dalam pelaksanaan proses *assurance*, termasuk perencanaan kunjungan lapangan pada bulan Februari 2019, pelaksanaan kunjungan lapangan untuk verifikasi selama bulan Maret-April 2019 dan pembuatan laporan *assurance*.
- Merincikan wilayah konsesi yang dikunjungi pada proses *assurance*, yang terdiri dari dua konsesi milik PT RAPP, empat konsesi milik Mitra Pemasok dan dua konsesi milik Pemasok Pasar Terbuka, serta bahwa terdapat dua perwakilan pemangku kepentingan lokal yang berpartisipasi sebagai pengamat selama kunjungan lapangan.
- Memaparkan hasil pengamatan utama serta ringkasan temuan, yang terdiri dari satu ketidaksesuaian, dua praktik baru dan tujuh peluang untuk perbaikan.
- Memberikan rangkuman status rencana aksi APRIL hingga tahun 2019, dimana seluruh rencana aksi n terkait ketidaksesuaian yang ditemukan sebelumnya atau saat ini telah terselesaikan, dan 12 rencana aksi terkait peluang perbaikan yang belum terselesaikan

(dari rencana aksi yang telah ditetapkan sebelumnya).

### Hasil Pengamatan Proses *Assurance* oleh Perwakilan Pemangku Kepentingan

#### Bapak Azharuddin M. Amin (Universitas Islam Riau)

- Mengamati bahwa permasalahan di Estate Cerenti (konsesi milik PT RAPP) terjadi pada area konservasi yang berbatasan dengan tanaman pokok milik masyarakat, memberikan resiko perambahan. Diamati bahwa terdapat kelemahan akibat tidak adanya pemberitahuan tentang tata guna lahan sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa area tersebut adalah area konservasi.
- Mengamati adanya persoalan terkait perbedaan peta yang dikeluarkan dari pemerintah dan peta yang dimiliki masyarakat.
- Menyarankan agar dilakukan sosialisasi yang lebih intens dan kepada masyarakat sehingga dapat menekan angka kejadian perambahan.
- Melihat adanya perbedaan proses verifikasi antara tahun 2018 dengan tahun ini. Sebagai contoh, pada tahun 2018, dilakukan kunjungan untuk mengecek alat-alat pemadaman kebakaran namun pada tahun 2019 tidak dilakukan kunjungan serupa ketika meninjau indikator terkait pengelolaan resiko kebakaran.
- Mengamati bahwa selama proses *assurance*, terjadi proses konfirmasi data yang berulang-ulang antara data milik staf lapangan dengan data milik staf kantor pusat, maupun adanya perbedaan informasi antara yang disajikan oleh staf lapangan dengan yang disajikan oleh staf kantor pusat sehingga menimbulkan keraguan dari tim proses *assurance*. Menyarankan agar adanya proses pengumpulan data yang terpusat, konsisten dan akurat sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses *assurance* maupun menjaga kredibilitas data.
- Verifikasi teknis yang dilakukan oleh tim proses *assurance* sudah sangat baik. Terlihat bahwa tim tersebut memahami dengan baik indikator serta data-data yang ditinjau.
- Mengusulkan adanya pengukuran dampak inisiatif pengembangan masyarakat dalam cakupan proses *assurance*, mengingat pada proses *assurance* saat ini hanya mengukur sebatas hasil (*output*) program pengembangan masyarakat.
- Melihat tidak adanya proses identifikasi sebagai penyebab perambahan dalam proses *assurance* dan menilai bahwa identifikasi sebab-akibat ini sebaiknya menjadi prioritas utama untuk menekan angka perambahan.
- Mengamati adanya perbedaan opini antar pengurus desa setempat yang menjabat saat ini dengan yang menjabat pada periode sebelumnya dan menyarankan agar diadakan evaluasi berkala terkait kelayakan pemberian kompensasi kepada masyarakat.
- Menyarankan agar pengamat dapat berpartisipasi di seluruh site yang dikunjungi selama *assurance*. Seandainya terdapat kendala

keterbatasan waktu dari pihak pengamat, maka dapat dipertimbangkan untuk menambah jumlah pengamat.

- Menyampaikan harapannya agar ada kemauan dari perusahaan untuk mendisiplinkan wajib pajak dari kegiatan operasional, yaitu dengan menggunakan nomor pajak Riau sehingga kontribusi pajak dari kegiatan tersebut seluruhnya akan terhitung ke dalam perhitungan ekonomi Riau.

#### **Ibu Linda Veronika (TAPAK)**

- Mengamati adanya informasi yang berubah-ubah dari yang disediakan oleh tim estate, sehingga diusulkan untuk meninjau kembali sistem pengumpulan dan validasi data
- Mengusulkan agar melakukan verifikasi kepada masyarakat yang terlibat klaim lahan
- Mengamati bahwa adanya kebutuhan untuk mensinkronisasi data luasan desa dari DLHK ke Menteri Dalam Negeri dan Kementrian Pedesaan sehingga dapat dibuktikan kebenaran penyebab kejadian perambahan yang dituduhkan kepada masyarakat.
- Mengamati adanya keinginan kelompok masyarakat di Desa Mungkur untuk mengelola tanaman kehidupannya secara mandiri.
- Melihat perlunya pemisahan formulir penyampaian keluhan untuk pekerja dan untuk masyarakat.
- Melihat bahwa formulir penyampaian keluhan telah disebar, namun tidak dapat dipastikan bahwa pekerja yang menyampaikan keluhannya tidak akan mendapatkan peringatan ataupun pemberhentian kerja dari perusahaan.
- Mengamati adanya pengembangan untuk mengukur keberhasilan program pengembangan masyarakat oleh APRIL dan menggaris bawahi agar dilakukan evaluasi jika hasil tersebut menunjukkan tren kesejahteraan masyarakat yang menurun.
- Mengusulkan agar APRIL dapat menjadi pionir untuk memutus mata rantai rentenir yang mengganggu sumber pemasukan masyarakat, dengan memberikan pelatihan dan pembekalan kepada petugas BUMDESA sehingga dapat membantu penjualan produk desa.
- Mengingat pentingnya netralitas, maka disarankan agar proses *assurance* dilakukan oleh tim KPMG dan pengamat, tanpa diawasi oleh tim APRIL.

- Menerangkan bahwa APRIL mengembangkan rencana aksi sebagai tidak lanjut atas hasil temuan dari proses *assurance* SFMP 2.0
- Memberikan deskripsi terkait rencana aksi APRIL tahun 2019, yang terdiri dari delapan rencana aksi untuk menjawab satu ketidaksesuaian dan tujuh peluang perbaikan yang diidentifikasi dari proses *assurance* tahun 2019.
- Menyampaikan bahwa rencana aksi APRIL untuk mengatasi temuan ketidaksesuaian terkait pengembangan baru oleh satu Pemasok Pasar Terbuka yang dilakukan bertentangan dengan SFMP 2.0 telah terselesaikan.
- Menjelaskan bahwa tujuh rencana aksi lainnya telah dilaporkan dan diterima oleh KPMG PRI dan pelaksanaannya sedang berjalan.

### Sesi Tanya Jawab

Pertanyaan	Jawaban
<p><b>Muhammad Mardhiansyah (UNRI)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan harapannya agar KPMG dapat melakukan penilaian pelaksanaan SFMP 2.0 secara utuh meskipun kunjungan lapangan dilakukan secara sampling. Terlihat bahwa pemberitaan tentang APRIL di media berbeda dengan apa yang diamati oleh KPMG selama proses <i>assurance</i>, sehingga penting untuk memastikan bahwa proses <i>assurance</i> menangkap dengan baik dan utuh kenyataan yang terjadi di lapangan.</li> <li>• Berpendapat bahwa persoalan mendasar untuk perhutanan di Riau maupun di Indonesia adalah terkait perbedaan persepsi, dimana perusahaan memiliki persepsi sendiri atas suatu regulasi ataupun sains dan umumnya berbeda dengan persepsi publik. Menyarankan agar SAC, melalui KPMG, melakukan analisis persepsi publik.</li> <li>• Menyarankan agar rekomendasi-rekomendasi dari KPMG sebagai badan independen dan netral dapat disampaikan</li> </ul>	<p><b>Yudi Iskandarsyah (Anggota Tim Assurance KPMG)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyatakan bahwa secara umum, proses <i>assurance</i> yang dilakukan ini adalah untuk penilaian utuh dan dilengkapi dengan pengawasan (<i>surveillance</i>).</li> <li>• Menerima saran tersebut serta berpendapat bahwa penyampaian rekomendasi untuk bahan pertimbangan regulasi pemerintah merupakan tanggung jawab seluruh pihak</li> </ul> <p><b>Roopa Dave (KPMG PRI)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berterima kasih atas masukannya, terutama untuk usulan terkait studi persepsi publik, karena KPMG juga menyadari pentingnya pemahaman atas pemahaman publik untuk memperkaya hasil temuan laporan <i>assurance</i>.</li> <li>• Menyadari bahwa terdapat banyak kekhawatiran bahwa area produksi akan berkurang secara signifikan sebagai hasil dari regulasi pemerintah. Namun berdasarkan revisi</li> </ul>

kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar dapat menjadi bahan pertimbangan terkait pengelolaan hutan.

- Menanyakan hasil penilaian KPMG terhadap kemajuan APRIL terkait kawasan produksi yang sebelumnya dialihkan untuk menjadi kawasan ekosistem gambut/kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG).
- Menanyakan apakah hutan rakyat merupakan bagian dari pemasok APRIL, mengingat besarnya potensi hutan rakyat di Riau serta keterbatasan lahan yang dapat dikelola RAPP akibat adanya konflik lahan.

regulasi, hanya sedikit jumlah area produksi yang berkurang.

- Mengundang SAC dan APRIL untuk berpendapat terkait hutan rakyat sebagai bagian dari rantai pasokan, mengingat topik ini juga dibahas pada forum pemangku kepentingan di Jakarta pada hari sebelumnya serta disadari bahwa dengan melibatkan hutan rakyat sebagai pemasok kayu, maka perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### **Joseph C. Lawson (SAC)**

- Memahami kekhawatiran para pemangku kepentingan terhadap fakta bahwa proses *assurance* hanya mencakup beberapa indikator, dan menegaskan bahwa indikator tersebut dipilih karena dianggap sebagai area yang beresiko tinggi.
- Kembali mengingatkan bahwa proses *assurance* dilaksanakan setiap tahun dan berterima kasih atas sarannya yang berguna sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan indikator pada proses *assurance* selanjutnya.

#### **Jeffrey Sayer (SAC)**

- Menjelaskan bahwa kehutanan telah berubah secara signifikan dan menunjukkan tren positif, dimana gagasan bahwa industry kehutanan harus dapat mendukung kesejahteraan masyarakat sudah sangat nyata.
- Berpendapat bahwa saran terkait studi persepsi publik

	<p>tersebut sangat bermanfaat untuk direalisasikan, namun juga mendorong agar saran tersebut diutarakan pada diskusi-diskusi lain yang serupa, terutama pada tingkat diskusi politik.</p> <p><b>Ibu Erna Witoelar (SAC)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyatakan bahwa perbedaan persepsi itu penting, dan teramati selama forum pemangku kepentingan SAC di Jakarta hari sebelumnya, dimana para pemangku kepentingan menanyakan perihal <i>feasibility</i> penilaian Nilai Konservasi Tinggi (<i>High Conservation Value/HCV</i>) dan Nilai Karbon Tinggi (<i>High Carbon Stock/HCS</i>) untuk hutan rakyat, dan bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut muncul pada forum ini.</li> <li>• Mendorong para pemangku kepentingan untuk menyuarakan pendapatnya terkait regulasi kepada pemerintah pusat dan mengingatkan bahwa masukan-masukan dari tingkat daerah dapat menjadi bahan pertimbangan di tingkat pusat.</li> <li>• Menjelaskan bahwa saat ini belum ada definisi yang jelas untuk pendekatan bentang alam sehingga berpotensi memperlambat pelaksanaannya. Namun dalam waktu dekat akan diputuskan kebijakan mengenai bentang alam, yang akan sangat membantu proses diskusi dan pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.</li> </ul>
<p><b>Setyo W. (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menanyakan tentang realisasi program tanaman kehidupan</li> </ul>	<p><b>Susilo Sudarman (APRIL)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan bahwa saat ini, terdapat 15 hutan rakyat</li> </ul>

PT RAPP, karena berdasarkan data yang dimiliki DLHK, realisasi tanaman kehidupan PT RAPP sangat rendah; berbanding terbalik dengan realisasi penanaman tanaman pokok yang hampir mencapai 100% di tengah tahun 2019 ini.

- Menyatakan bahwa berdasarkan catatan DLHK, PT RAPP tidak merujuk kepada P.83 dalam pelaksanaan program tanaman kehidupannya, sehingga disarankan agar PT RAPP mengacu pada P.83 tersebut sehingga dapat memperoleh pengakuan dan perlindungan dari pemerintah untuk program tersebut.
- Menanyakan apakah PT RAPP dapat menjadi pionir untuk mendorong hutan rakyat, mengingat besarnya potensi hutan rakyat di Provinsi Riau.

yang didukung oleh PT RAPP melalui skema kemitraan dan berada di sekitar kawasan hutan dan daftar hutan rakyat tersebut dapat dilihat pada situs APRIL Dashboard.

- Menerangkan bahwa APRIL menyadari adanya peluang perbaikan untuk pengembangan program hutan rakyat tersebut, namun kesulitannya adalah pengembangan hutan rakyat tersebut akan mencakup kegiatan pengembangan baru yang harus dilaksanakan sesuai komitmen *no deforestation* dalam kebijakan SFMP 2.0.
- Menjelaskan bahwa area yang dialokasikan untuk tanaman kehidupan juga harus memenuhi kebijakan SFMP 2.0 yang mewajibkan pelaksanaan penilaian HCV dan HCS sebelum pengembangan baru, sehingga proses pengembangan tersebut dapat menjadi sangat lambat.
- Menyatakan bahwa PT RAPP akan memberikan perkembangan terbaru terkait program tanaman kehidupan sesuai P.83 kepada dinas pemerintah terkait.

**Dian Novarina (APRIL)**

- Menjelaskan bahwa PT RAPP memberikan program peningkatan keterampilan untuk hutan rakyat dan non-hutan rakyat, serta terdapat dua hutan rakyat binaan PT RAPP, yaitu HR Bedaguh dan HR Parit Limbah di Pelalawan, Riau, yang saat ini sedang dalam proses akhir untuk mendapatkan sertifikasi PEFC.
- Membenarkan bahwa PT RAPP berencana untuk mendaftarkan program tanaman kehidupannya sesuai P.83 sehingga dapat mendukung pencapaian



	<p>pemerintah utk kemitraan hutan rakyat.</p> <p><b>Susilo Sudarman (APRIL)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerangkan bahwa salah satu kendala dalam mengintegrasikan hutan rakyat ke dalam rantai pasokan adalah terkait proses sertifikasi produk hasil hutan, dimana pelanggan APRIL hanya menerima produk yang memiliki sertifikat PEFC sedangkan hutan rakyat hanya memerlukan sertifikasi DKP.</li> </ul>
<p><b>Program Pengembangan Masyarakat – Binahidra Longiardi, Kepala Program Pengembangan Masyarakat, APRIL</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan tujuan program pengembangan masyarakat APRIL, yang saat ini telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goal/SDG</i>) yang APRIL tentukan sebagai prioritas.</li> <li>• Menerangkan tahapan pengelolaan program pengembangan masyarakat, yang terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan, serta dimana partisipasi masyarakat dan pelibatan pemangku kepentingan terus menjadi bagian di setiap tahap tersebut.</li> <li>• Merinci program pengembangan masyarakat APRIL yang berfokus di bidang pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>• Menjelaskan tujuan, cakupan, pencapaian, tantangan serta rencana aksi untuk masing-masing program pengembangan masyarakat.</li> </ul>	
<p><b>Sesi Tanya Jawab</b></p>	
<p><b>Yulianti (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion/P3E)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyatakan bahwa belum terlihat program pengembangan masyarakat milik APRIL yang turut mendukung program Riau Hijau.</li> </ul>	<p><b>Binahidra Longiardi (APRIL)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerangkan bahwa perencanaan program pengembangan masyarakat APRIL dilakukan berdasarkan konsultasi dengan masyarakat setempat yang dilakukan</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyarankan untuk melakukan kegiatan pengembangan masyarakat yang tidak melibatkan lahan, misalkan budidaya ikan, sehingga program tidak memerlukan kegiatan pembukaan lahan.</li> <li>• Berpendapat bahwa komitmen APRIL untuk melindungi lahan gambut belum terlihat secara signifikan.</li> <li>• Menyarankan agar SFMP 2.0 tidak hanya menyoroti permasalahan kehutanan namun juga aspek lingkungan lainnya, seperti pencemaran air, tanah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dll.</li> </ul>	<p>setiap akhir tahun melalui rembuk desa, dimana APRIL mendapatkan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai kebutuhannya serta bagaimana program pengembangan masyarakat dapat membantu pemenuhan kebutuhan tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menambahkan bahwa pemerintah di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi juga dilibatkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan perencanaan dan kebijakan pemerintah.</li> <li>• Mengundang pihak Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion/P3E untuk berdiskusi lebih terkait program bank pohon.</li> </ul> <p><b>Susilo Sudarman (APRIL)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerangkan bahwa kemajuan komitmen APRIL terkait pengelolaan lahan gambut dinilai dan dilaporkan dalam laporan <i>assurance</i> KPMG dan dapat diakses di situs APRIL Dashboard.</li> <li>• Menegaskan bahwa salah satu indikator pengelolaan lahan gambut berdasarkan SFMP 2.0 adalah kepatuhan dengan regulasi pemerintah dan APRIL telah melaksanakan kewajiban tersebut, termasuk terkait evaluasi RKU setiap dua tahun, sesuai dengan peraturan pemerintah.</li> </ul>
<p><b>Maizaldi (Kelompok Advokasi Riau)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyampaikan harapannya agar APRIL dapat membantu memfasilitasi penyelesaian permasalahan terkait tapal batas desa.</li> </ul>	<p><b>Susilo Sudarman (APRIL)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berterima kasih atas masukannya yang dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan harapannya agar APRIL dapat menjadi pionir dalam membina hutan rakyat.</li> </ul>	
<p><b>Iman Sukaendar (KPH Kampar Kiri)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menanyakan persentase area PT RAPP yang tidak aktif akibat konflik lahan.</li> <li>Menyampaikan bahwa terdapat kesempatan besar bagi perusahaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui program tanaman kehidupan dan bahwa terdapat tanaman komoditi bernilai tinggi lain selain kelapa sawit, seperti contoh adalah singkong. Menyarankan agar APRIL meninjau potensi tanaman komoditi lainnya untuk digunakan dalam program tanaman kehidupannya.</li> </ul>	<p><b>Susilo Sudarman (APRIL)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menerangkan bahwa saat ini pada hutan rakyat binaan PT RAPP, telah ditanami tanaman komoditi seperti singkong, dan bahwa masyarakat telah diberikan pengetahuan tentang pentingnya rotasi penanaman tanaman jangka panjang (contoh: akasia) dengan tanaman substitusi (contoh: singkong, cabe, jagung) yang dapat menghasilkan keuntungan dalam kurun waktu yang lebih singkat.</li> <li>Berterima kasih atas masukannya yang dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan.</li> </ul> <p><b>Erna Witoelar (SAC)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengingatkan bahwa jika suatu lahan ditanami dengan satu jenis tanaman (tanpa ada diversifikasi tanaman) maka pelaksanaan tersebut telah menyalahi prinsip bentang alam.</li> <li>Menjelaskan perlunya kombinasi penanaman antara yang bermanfaat untuk masyarakat dan untuk lingkungan hidup.</li> </ul>
<p><b>Jeffrey Sayer (SAC)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menanyakan kepada Bapak Azharuddin apakah KPMG melakukan diskusi dengan para pengamat sebelum melakukan kunjungan lapangan</li> </ul>	<p><b>Azharuddin – UNRI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan bahwa indikator telah terpilih ketika proses pemilihan pengamat dilakukan, dan bahwa pemilihan indikator bukanlah otoritas pengamat.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyarankan agar pemilihan ataupun perbaikan indikator untuk proses <i>assurance</i> selanjutnya juga turut mempertimbangkan perubahan kondisi di lapangan serta temuan-temuan baru dari proses <i>assurance</i> sebelumnya.</li> <li>• Menyarankan agar perusahaan mensinkronisasikan program pengembangan masyarakatnya dengan agenda pemerintah dan perusahaan sehingga hasil dari program pengembangan masyarakat dapat membantu penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi di Riau.</li> </ul>
<p><b>M. Putrappier – KPHK Kerumutan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyarankan agar APRIL lebih proaktif dalam mendukung kegiatan perlindungan fauna dan flora.</li> </ul>	<p><b>Susilo Sudarman (APRIL)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berterima kasih atas masukannya yang dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan.</li> </ul>
<p><b>Kata Penutup</b></p>	
<p><b>Erna Witoelar (SAC)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berpendapat bahwa berdasarkan diskusi ini, terlihat banyak potensi kemitraan yang dapat dilakukan antara masyarakat dengan perusahaan, dengan pemerintah, dengan pemangku kepentingan lainnya.</li> <li>• Berharap agar hasil diskusi ini dapat dicatat oleh KPMG untuk menjadi bahan diskusi lanjutan dengan APRIL.</li> </ul> <p><b>Joseph C. Lawson (Ketua SAC)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berterima kasih kepada para hadirin atas seluruh pertanyaan, saran, dan rekomendasinya.</li> <li>• Menerangkan bahwa hasil diskusi hari ini akan disampaikan kepada APRIL dalam pertemuan SAC di minggu ini.</li> </ul>	